

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Beban Ketergantungan Penduduk dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumbagsel Perspektif Ekonomi Islam

Aris Setiawan¹, Muhammad Iqbal Fasa²andSania Nuraziza³

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, arissetiawane92@gmail.com.

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, miqbalfasa@radenintan.ac.id.

³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, sania.nuraziza@radenintan.ac.id

ABSTRACT

From an Islamic economics vantage point, this research intends to examine the impact of population dependence ratio, economic development, and the Human Development Index (HDI) on income disparity in Sumbagsel, a region in southern Sumatra. Panel data from six Sumbagsel provinces spanning 2015–2024 form the basis of this study. The data was analyzed with the help of EViews 12. Income inequality is positively and significantly affected by the dependence ratio, and negatively and significantly by the HDI, according to the data. At the same time, there is no discernible impact from economic expansion. With a combined F-statistic likelihood value of 0.0000, all three factors were determined to significantly impact income inequality. These findings suggest that improving the quality of human development can help reduce inequality, whereas a high dependency ratio tends to widen it. From the Islamic economic perspective, equitable development through the enhancement of human resources and fair distribution is a core principle in promoting just and sustainable growth.

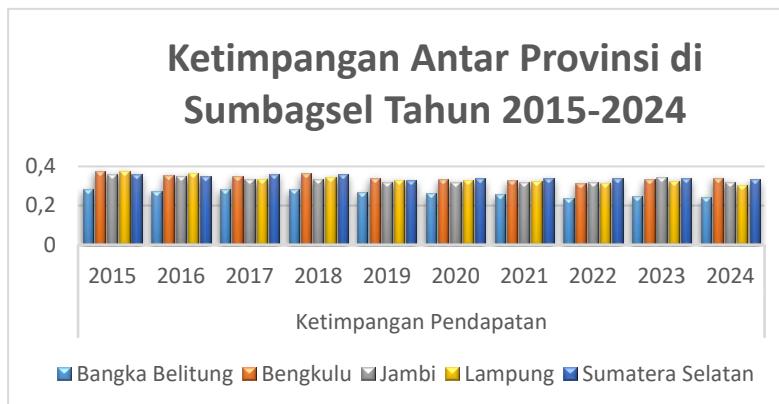
Keyword: Income Inequality, Economic Growth, Dependency Ratio, HDI, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi masalah ketimpangan pendapatan, yang merupakan masalah sensitif yang memainkan peran penting dalam upaya pengembangan negara dan wilayah (Dewi et al., 2022). Kita melihat perbedaan pendapatan yang signifikan, yang tercermin dalam perbedaan yang signifikan dalam pengeluaran masyarakat di berbagai daerah. Pembangunan yang tidak merata, yang disebabkan oleh kesenjangan tingkat pertumbuhan dan sumber daya regional, yang mengarah pada kesenjangan ini (Adnyaswari & Purbadharma, 2023). Secara khusus, provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung semuanya merupakan bagian dari wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), yang menunjukkan berbagai dinamika kesenjangan pendapatan. Kehidupan sosial dan ekonomi wilayah tersebut dapat terpengaruh secara negatif oleh meningkatnya kesenjangan pendapatan, menurut statistik Rasio Gini untuk periode 2015–2024. Ketimpangan yang tinggi dapat memiliki berbagai efek negatif, termasuk peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan parah, penurunan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu kesejahteraan sosial, menyebabkan kekerasan dan konflik, dan memperlambat kemajuan ekonomi (Widyawati &

Muchlisoh, 2022). Rasio Gini merupakan alat yang berguna untuk mengukur ketimpangan pendapatan (Aris, 2023). Menurut BPS Indonesia (2023), kesenjangan pendapatan dianggap semakin besar jika nilai skalanya semakin besar, yang menunjukkan ketimpangan sempurna, dan dianggap tidak ada atau hanya ada sedikit kesenjangan pendapatan jika nilainya semakin kecil, yang menunjukkan kesetaraan sempurna. Lima provinsi di Pulau Sumatera bagian selatan ditunjukkan pada Gambar 1 beserta rasio Gini masing-masing, yang menggambarkan ketimpangan pendapatan, dan bagaimana perubahannya selama kurun waktu tersebut 2015-2024.



Source: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1.Gini Ratio Antar Provinsi Tahun 2015-2024

Gambar di atas menyajikan perkembangan pemerataan pendapatan di tiga provinsi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi serta provinsi lainnya dinamika sosial-ekonomi yang beragam. Secara umum, hampir semua provinsi mengalami penurunan ketimpangan dalam jangka panjang. Bangka Belitung berhasil mengurangi ketimpangan dari 0,283 di 2015 menjadi 0,244 pada 2024, didukung oleh pembangunan infrastruktur dan perluasan akses pelayanan publik(Wulandari et al., 2023). Bengkulu, meskipun mengalami penurunan dari 0,376 di 2015 menjadi 0,315 pada 2022, kembali mengalami kenaikan menjadi 0,342 di 2024, menunjukkan bahwa tanpa transformasi struktural, penurunan ketimpangan bisa bersifat sementara(Syari, 2024).

Jambi menunjukkan tren stabil di kisaran 0,32–0,343 sejak 2020, mengindikasikan perlunya kebijakan fiskal inovatif untuk mendorong pemerataan ekonomi(Afton & Ukas, 2023). Lampung mencatat progres terbaik dengan ketimpangan yang turun dari 0,376 di 2015 menjadi 0,302 di 2024, terkait dengan keberhasilan program UMKM dan perluasan akses pertanian inklusif(Afton & Ukas, 2023). Sementara itu, Sumatera Selatan mengalami pola fluktuatif; setelah sempat turun menjadi 0,331 di 2019, ketimpangan kembali meningkat dan stagnan di kisaran 0,338–0,341 selama empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kendala struktural, seperti konsentrasi ekonomi di sektor tertentu dan disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang masih menjadi tantangan utama(Utami, 2020).Studi ini menegaskan bahwa penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dapat mendorong pertumbuhan inklusif dan menekan ketimpangan. Penelitian ini berupaya mengisi celah dalam studi sebelumnya yang telah mengeksplorasi ketimpangan pendapatan dari berbagai perspektif, tetapi masih terbatas dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, khususnya di wilayah Sumbagsel. Dengan menyoroti prinsip keadilan distributif dan kesejahteraan kolektif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan akademis serta perspektif baru bagi kebijakan Sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Variabel makro dan demografi, termasuk pertumbuhan PDB, rasio ketergantungan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terkait erat dengan fenomena ketimpangan ini. Menurut (Anggraeni, E., & Susanto, 2025), pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama pencapaian pembangunan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi. Meskipun kemakmuran yang lebih sering diyakini berarti lebih sedikit ketimpangan, hal ini tidak selalu terjadi. Kuznets berteori bahwa kesenjangan pendapatan dan aksesibilitas sumber daya akan menyebabkan penurunan ketimpangan setelah periode peningkatan ketimpangan pada tahap awal pembangunan. Akibatnya, melacak efek jangka riil pembangunan ekonomi terhadap distribusi pendapatan kawasan menjadi sangat penting Sumbagsel.

Selanjutnya, rasio beban ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) mengukur tekanan jumlah penduduk tidak produktif terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi menandakan beban ekonomi yang lebih besar, karena pendapatan harus dibagi lebih banyak, yang pada gilirannya dapat memperparah ketimpangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan produktivitas dan perlindungan sosial yang memadai (Adnyaswari & Purbhadharmaja, 2023). Sementara itu, IPM menjadi representasi dari kualitas hidup manusia, yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang dapat diterima. IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia yang lebih merata dan berpotensi menekan ketimpangan pendapatan. Namun, disparitas capaian IPM antarprovinsi di Sumbagsel masih menunjukkan ketimpangan akses dan hasil pembangunan antarwilayah. Dalam rentang waktu tersebut, pandemi COVID-19 menjadi faktor krusial yang turut mempengaruhi ketimpangan. Data menunjukkan bahwa ketimpangan sempat menurun di masa pandemi akibat turunnya aktivitas ekonomi kelas menengah ke atas serta masifnya distribusi bantuan sosial (Jubba et al., 2021). Namun, Efek perbaikan bersifat sementara, karena pasca pandemi ketimpangan kembali meningkat, menunjukkan solusi yang belum struktural dan berkelanjutan. Kebijakan nasional yang bersifat umum kurang efektif, sehingga diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik lokal dan potensi daerah. Kombinasi strategi top-down dan bottom-up diperlukan untuk menangani akar masalah ketimpangan secara optimal.

Dalam ekonomi Islam, ketimpangan pendapatan yang ekstrem bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi. Islam menekankan pemerataan ekonomi demi keberlanjutan sosial, sebagaimana tercermin dalam Maqashid Syariah, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dari hingga hifz al-mal (menjaga harta) dan seterusnya hifz al-nafs (menjaga jiwa). Salah satu instrumen utama dalam koreksi distribusi adalah zakat, yang berfungsi secara ekonomi dan sosial untuk mengalirkan kekayaan dari kelompok kaya kepada yang membutuhkan secara terstruktur dan etis (Yusuf, 2022).

Tujuan

Penelitian ini menganalisis Dampak teori ekonomi Islam terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan (Sumbagsel) melalui variabel pertumbuhan PDB, rasio ketergantungan penduduk, dan IPM. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia ditekankan sebagai faktor kunci dalam fokus penelitian ini untuk menghilangkan ketimpangan serta dampak rasio ketergantungan terhadap distribusi pendapatan. Dengan berlandaskan prinsip keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang ketimpangan pendapatan di Sumbagsel serta relevansi ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan ekonomi berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan suatu wilayah pada kenyataannya tidak dapat menghapuskan ketimpangan. Karena adanya ketimpangan, daerah-daerah yang kurang beruntung akan memiliki lebih banyak insentif untuk berupaya meningkatkan standar hidup mereka dan mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah yang lebih maju. Lebih jauh lagi, daerah-daerah ini akan berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka, yang merupakan hasil yang menguntungkan dari ketimpangan dalam hal ini. Namun, meningkatnya ketimpangan regional terkadang memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Ketimpangan yang tinggi sering kali dianggap tidak adil dan memiliki implikasi negatif pada efisiensi ekonomi, stabilitas sosial, dan solidaritas. Dua indikator utama distribusi pendapatan adalah distribusi ukuran pendapatan dan distribusi pendapatan per komponen produk (Todaro, M. P., & Smith, 2020). Menurut Kuznets, negara-negara berkembang sering kali melihat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang memburuk sebagai akibat dari kemajuan ekonomi pertama mereka. Kemudian, seiring berkembangnya negara, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan akan berkurang. Kurva Kuznets menggambarkan hubungan positif antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan pendapatan per kapita dalam jangka pendek. Meskipun demikian, hubungan negatif muncul antara kedua variabel tersebut seiring berjalannya waktu. (Mudrajad Kuncoro, 2017).

Pertumbuhan Ekonomi

Nilai komoditas dan layanan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi meningkat selama dua periode waktu berturut-turut, dinyatakan sebagai persentase, dan ini dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan riil suatu negara selama periode waktu tertentu merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Suatu negara dikatakan mengalami pembangunan ekonomi jika menghasilkan banyak barang dan jasa dan juga mengalami perbaikan kelembagaan atau teknologi (Mulyani, 2017). Pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara luas dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Regional Bruto, di sisi lain, adalah cara untuk mengukur perluasan wilayah ekonomi suatu provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah semua produk dan layanan akhir yang diproduksi dalam suatu wilayah tertentu, atau nilai yang dihasilkan oleh semua bisnis yang beroperasi di wilayah tersebut. (Zainuddin et al., 2023).

Rasio Beban Ketergantungan Penduduk

Angka ketergantungan adalah statistik numerik yang membandingkan proporsi penduduk yang tidak bekerja atau berusia di bawah 15 tahun dengan penduduk usia kerja atau lansia, yang didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 15 dan 64 tahun. Angka ketergantungan atau tarif ini harus dibayarkan oleh mereka yang termasuk dalam angkatan kerja, bukan lansia atau penyandang disabilitas. Semakin tinggi tingkat ketergantungan suatu penduduk, semakin banyak pula anggota masyarakat atau penduduk yang produktif yang harus bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup anggota masyarakat yang tidak produktif. Sebaliknya, angka ketergantungan yang lebih rendah berarti penduduk yang bekerja tidak terlalu berkewajiban untuk mendukung penduduk yang tidak produktif (Disdukcapil, 2023).

Indeks Pembangunan Manusia

Dengan membandingkan PDB, tingkat pendidikan, dan harapan hidup suatu negara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran singkat tentang kemajuan ekonomi negara tersebut. Laporan Pembangunan Manusia (IPM) diterbitkan pada tahun 1990 oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan menetapkan gagasan tentang pembangunan manusia. Makalah tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah kekayaan negara dan alasan untuk pembangunan. Umur panjang, sehat, dan produktif hanyalah beberapa manfaat masyarakat yang dapat diharapkan dari lingkungan yang maju (Yuliansyah, 2021).

Penelitian Terdahulu

Ketimpangan pendapatan telah menjadi subjek banyak penelitian dalam kerangka ekonomi nasional dan regional, menurut penelitian sebelumnya. Penelitian tentang ketimpangan di Yogyakarta (Khoirudin & Musta'in, 2020) menunjukkan bahwa sementara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi ditemukan tidak memiliki dampak yang signifikan, pengangguran terbuka dan upah minimum terbukti meningkatkan ketimpangan. Menurut penelitian tentang dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan sektor pertanian (Akbar et al., 2021), subsektor tertentu, seperti perkebunan dan peternakan, dapat membantu menurunkan ketimpangan, sementara yang lain, seperti hortikultura dan perikanan, dapat memperburuknya.

Pertumbuhan ekonomi berhasil menurunkan kemiskinan tetapi memiliki efek yang lebih kecil dalam mengurangi ketimpangan, menurut sebuah studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kedua variabel ini di Bangka Belitung (Novriyandi et al., 2024). Inflasi dan jumlah penduduk berdampak signifikan terhadap ketimpangan, meskipun industri jasa dan pertanian berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Distribusi pendapatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan IPM; HDI membantu mengurangi ketimpangan, menurut penelitian lain yang mengamati ketimpangan di Minahasa (Makipantung et al., 2023) yang menemukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi berdasarkan laporan data yang diterbitkan oleh BPS di Sumatera Selatan dari tahun 2015 hingga 2024 tentang pertumbuhan ekonomi, rasio ketergantungan penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan ketimpangan pendapatan. Dengan menggunakan metode Purposive Sampling, yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan tujuan penelitian, data yang digunakan dalam sampel mencakup sepuluh tahun terakhir, dari tahun 2015 hingga 2024 (Lenaini, 2021). Data diolah menggunakan perangkat lunak EViews12, dan bersumber dari publikasi tahunan BPS dan literatur terkait. (Andjarwati, T., Budiarti, E., Susilo, K. E., Yasin, M., & Soemadijo, 2021) menggambarkan karakteristik sampel menggunakan statistik deskriptif. Dengan menggunakan teknik data panel, kami menggabungkan data cross-sectional dari lima provinsi Sumatera Selatan dengan data deret waktu (2015–2024). Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model adalah tiga model utama yang digunakan dalam analisis data panel (Rahman, 2019). Pada taraf signifikansi 5%, digunakan uji Chow dan Hausman untuk memilih model regresi (Basuki, 2021). Selain itu, pada penelitian ini digunakan taraf signifikansi 5% untuk melakukan Uji Hausman (Basuki, 2021). Uji asumsi tradisional dilakukan sebelum analisis regresi untuk menjamin validitas model. Uji ini difokuskan pada

heteroskedastisitas dan multikolinearitas (Savitri et al., 2022). Dengan taraf signifikansi 0,05, uji t digunakan dalam pengujian hipotesis untuk mengevaluasi dampak faktor independen terhadap variabel dependen (Widarjono, 2020). Sedangkan uji F digunakan untuk mengevaluasi dampak gabungan semua faktor independen terhadap variabel dependen pada taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2023). Menurut (Ghozali, 2023), nilai R² yang lebih tinggi menunjukkan bahwa variabel independen lebih berkontribusi terhadap varians data dependen, dan digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar variasi data dependen dapat dijelaskan oleh model regresi.

Jika tidak ada bukti yang mendukung pertanyaan penelitian, hipotesis dapat dilihat sebagai solusi teoritis yang berfungsi.

1. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Kuznets mengajukan teori U terbalik tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Menurut teori ini, ketimpangan pendapatan meningkat pada awal pertumbuhan ekonomi tetapi turun sebagai akibat dari distribusi pendapatan yang lebih merata setelah beberapa saat.

Menurut sebuah penelitian oleh (Kunenengen et al., 2023), ketimpangan pendapatan dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh variabel pertumbuhan ekonomi.

H₀1 : Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan

H_a1: Diyakini bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi.

2. Rasio Ketimpangan Pendapatan terhadap Beban Ketergantungan Penduduk

Beban penduduk yang tidak produktif meningkat seiring dengan meningkatnya rasio ketergantungan. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang rendah mengurangi beban penduduk usia kerja untuk menghidupi orang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Rasio ketergantungan penduduk secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini (Utami, 2020), dengan nilai tanda 0,038.

H₀2: Ketimpangan Pendapatan Tidak Dipengaruhi oleh Rasio Ketergantungan Penduduk

H_a2: Ketimpangan Pendapatan Dipengaruhi oleh Rasio Ketergantungan Penduduk

3. Dampak Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan

Produktivitas dan pendapatan penduduk didorong oleh IPM yang tinggi, sedangkan keduanya menurun oleh IPM yang rendah. Ketimpangan pendapatan dipengaruhi secara negatif dan tidak signifikan oleh indeks pembangunan manusia, menurut penelitian (Sholikah N Rodiyatul & Imaningsih Niniek, 2022).

H₀3: Ketimpangan Pendapatan Tidak Dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia

H_a3: Ketimpangan Pendapatan Dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia

HASIL DAN ANALISIS

Analisis Statistik Deskriptif

Table 1. Hasil Analisis Deskriptif

| KP | PE | RBKP | IPM |
|----|----|------|-----|
| | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mean | 0.323620 | 4.002200 | 46.57260 | 70.56760 |
| Median | 0.333000 | 4.530000 | 46.49000 | 70.64500 |
| Maximum | 0.376000 | 6.010000 | 50.83000 | 73.43000 |
| Minimum | 0.236000 | -2.290000 | 42.46000 | 66.95000 |
| Std. Dev. | 0.034987 | 1.869861 | 2.102717 | 1.596545 |
| Skewness | -0.947988 | -2.058371 | -0.086118 | -0.163201 |
| Kurtosis | 3.152006 | 6.346778 | 2.400475 | 2.401600 |
| <hr/> | | | | |
| Jarque-Bera | 7.537150 | 58.64267 | 0.810616 | 0.967960 |
| Probability | 0.023085 | 0.000000 | 0.666771 | 0.616326 |
| <hr/> | | | | |
| Sum | 16.18100 | 200.1100 | 2328.630 | 3528.380 |
| Sum Sq. Dev. | 0.059982 | 171.3227 | 216.6496 | 124.8989 |
| <hr/> | | | | |
| Observations | 50 | 50 | 50 | 50 |

Source: Eviews12 (data diolah, 2025)

Penelitian ini mengkaji 50 data dari 5 provinsi di Sumatera Selatan tahun 2015 sampai dengan 2024. Hasil analisis deskriptif disajikan pada Tabel 3.1. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki mean sebesar 4,002200, median sebesar 4,530000, maksimum sebesar 6,010000, minimum sebesar -2290000, dan simpangan baku sebesar 1,869861. Mean sebesar 46,57260, median sebesar 46,49000, maksimum sebesar 50,83000, minimum sebesar 42,46000, dan simpangan baku sebesar 2,102717 merupakan variabel rasio ketergantungan penduduk. Dengan rentang nilai dari 66,95000 hingga 73,43000, median 70,64500, dan deviasi standar 1,596545, variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan rentang karakteristik statistik yang luas. Dengan rata-rata 0,323620, median 0,333000, maksimum 0,376000, minimum 0,236000, dan deviasi standar 0,034987, kita memiliki variabel ketimpangan pendapatan.

Estimasi Data Panel

Uji Chow

Table 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------|-----------|------|-------|
|--------------|-----------|------|-------|

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 63.283888 | (4,42) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 97.488257 | 4 | 0.0000 |

Source: Eviews12 (data diolah, 2025)

Nilai distribusi Chi-square dan probabilitas F-statistik keduanya adalah 0,0000 menurut temuan Uji Chow yang telah dilakukan. Kami mengadopsi H1 sebagai hipotesis alternatif karena hasilnya kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Untuk itu, Model Efek Tetap adalah standar emas.

Uji Hausman

Table 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. | | | Prob. |
|----------------------|-----------|---------|--------|-------|
| | Statistic | Chi-Sq. | d.f. | |
| Cross-section random | 12.138141 | 3 | 0.0069 | |

Source: Eviews12 (data diolah, 2025)

Mengacu pada hasil Uji Hausman yang dilakukan, diperoleh Terdapat nilai probabilitas chi-square sebesar 0,0069. Kita dapat menerima H1 sebagai hipotesis alternatif karena hasilnya kurang dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, Model Efek Tetap merupakan pilihan terbaik untuk penelitian ini.

Temuan ini menunjukkan bahwa model optimal telah ditemukan, sehingga tidak diperlukan pengujian lebih lanjut menggunakan Uji Pengganda Lagrange. Untuk menguji dampak pertumbuhan PDB, PDR, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Model Efek Tetap dipilih sebagai metode optimal menurut Uji Chow dan Hausman. Persamaan merupakan hasil estimasi model:

$$\text{KP} = 0.708728686851 + 0.000451563141102 * \text{PE} + 0.00286840497116 * \text{RBKP} - 0.00737597722204 * \text{IPM}$$

Interpretasi dari hasil estimasi model tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Di dalam persamaan tersebut, nilai konstanta sebesar 0,7087 atau sekitar 70,87% menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan ketika seluruh variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi (X_1), rasio beban ketergantungan penduduk (X_2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X_3), berada pada nilai nol atau tidak memberikan pengaruh. Dengan kata lain, nilai ini mencerminkan besarnya ketimpangan yang dapat terjadi tanpa adanya intervensi dari faktor-faktor tersebut.
2. Selanjutnya, koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) sebesar 0,00045 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi variabel lain tetap, akan mengurangi kesenjangan pendapatan sebesar 0,45 persen. Namun, ketimpangan diperkirakan tetap tidak berubah bahkan jika pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 1%.

3. Jika semua faktor lain tidak berubah, kenaikan rasio ketergantungan sebesar 1% akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,29%. Hal ini karena variabel rasio ketergantungan populasi (X_2) memiliki koefisien sebesar 0,00287. Efek yang sama dan berlawanan pada peningkatan ketimpangan akan terjadi akibat pengurangan rasio ketergantungan.
4. Koefisien negatif sebesar -0,00738 ditunjukkan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_t) pada saat yang sama. Akan ada penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0,73% untuk setiap kenaikan 1% pada HDI. Pembangunan manusia yang lebih baik, termasuk unsur-unsur kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi. Sebaliknya, penurunan IPM akan berimplikasi pada peningkatan ketimpangan dalam jumlah yang sama.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Table 4. Hasil Uji Multikolinieritas

| | PE | RBKP | IPM |
|------|-----------|-----------|-----------|
| PE | 1.000000 | 0.425351 | -0.190130 |
| RBKP | 0.425351 | 1.000000 | -0.622754 |
| IPM | -0.190130 | -0.622754 | 1.000000 |

Source: Eviews12 (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas yang dilakukan, Variabel independen model memiliki nilai korelasi di bawah ambang batas yang ditetapkan sebesar 0,85. Secara khusus, koefisien korelasi untuk X_1 dan X_2 adalah $0,425351 < 0,85$, X_1 dan X_3 adalah $-0,190130 < 0,85$, dan X_2 dan X_3 adalah $-0,622754 < 0,85$. Hal ini membuktikan bahwa variabel independen tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas. Artinya, tidak ada korelasi antara variabel independen mana pun dalam penelitian ini karena semuanya sepenuhnya terpisah mempengaruhi validitas hasil regresi yang diperoleh.

Uji Heteroskedastisitas

Table 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -0.068320 | 0.067305 | -1.015071 | 0.3159 |
| PE | 0.000704 | 0.000463 | 1.521298 | 0.1357 |
| RBKP | 0.000427 | 0.000625 | 0.683087 | 0.4983 |
| IPM | 0.000747 | 0.000667 | 1.120315 | 0.2689 |

Source: Eviews12 (data diolah, 2025)

Nilai probabilitas untuk variabel X_1 , X_2 , dan X_3 masing-masing adalah 0,1357, 0,4983, dan 0,2689, menurut hasil uji heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel

tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas, karena semua nilai probabilitas lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, model tersebut diterima dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

*Uji Parsial (*t*)*

Table 6. Hasil Uji Parsial

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 0.708729 | 0.120957 | 5.859332 | 0.0000 |
| PE | 0.000452 | 0.000832 | 0.542775 | 0.5902 |
| RBKP | 0.002868 | 0.001124 | 2.552391 | 0.0144 |
| IPM | -0.007376 | 0.001199 | -6.154051 | 0.0000 |

Source: Eviews12 (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh, berikut adalah interpretasi dari uji *t* terhadap sebagai variabel tersendiri:

1. dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (*X*1) mempunyai arah hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan hasil uji *t* yang menghasilkan nilai *t*-Statistik sebesar 0,542775 dan nilai Prob. sebesar $0,5902 > 0,05$.
2. Uji *t* pada variabel rasio ketergantungan penduduk (*X*2) menghasilkan nilai *t*-Statistik sebesar 2,552391 dan nilai Prob. sebesar $0,0144 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel rasio ketergantungan penduduk berhubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2024.
3. Nilai *t*-Statistik sebesar -6,154051 dan nilai Prob. Nilai *t*-test yang dilakukan pada variabel indeks pembangunan manusia (*X*3) adalah sebesar $0,0144 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia mempunyai arah hubungan negatif yang cukup besar dan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu variabel dependen yaitu variabel indeks pembangunan manusia (*X*3) ketimpangan pendapatan di Sumbagsel tahun 2015-2024.

*Uji Simultan (*f*)*

Table 7. Hasil Uji Simultan

| | |
|--------------------|----------|
| R-squared | 0.933923 |
| Adjusted R-squared | 0.922910 |
| S.E. of regression | 0.009714 |
| Sum squared resid | 0.003963 |
| Log likelihood | 165.1198 |
| F-statistic | 84.80290 |

| | |
|-------------------|----------|
| Prob(F-statistic) | 0.000000 |
|-------------------|----------|

Source: Eviews12 (data diolah, 2025)

Nilai F yang dihitung adalah 84,80290 dengan tingkat signifikansi yang sangat kecil yaitu 0,000000 < 0,05, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil estimasi. Sederhananya, ketimpangan pendapatan di wilayah Sumatera Selatan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pertumbuhan ekonomi (X1), rasio ketergantungan penduduk (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X3) secara bersamaan (Sumbagsel) tahun 2015-2024.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Table 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| | |
|--------------------|----------|
| R-squared | 0.933923 |
| Adjusted R-squared | 0.922910 |
| S.E. of regression | 0.009714 |
| Sum squared resid | 0.003963 |
| Log likelihood | 165.1198 |
| F-statistic | 84.80290 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 |

Source: Eviews12 (data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil estimasi, nilai R-kuadrat terkoreksi sebesar 0,922910 atau 92,29%. Ketimpangan pendapatan di wilayah Sumbagsel, Sumatera Selatan sebagian dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen dalam model, yaitu pertumbuhan ekonomi, rasio ketergantungan penduduk, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 92,29%. Sementara itu, penelitian ini tidak memperhitungkan varians lainnya sebesar 7,71% yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar model.

Analisis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumbagsel

Berdasarkan Ketimpangan pendapatan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) tahun 2015-2024 berkorelasi positif dengan Pertumbuhan Ekonomi, meskipun korelasi ini tidak signifikan secara statistik. Hal ini ditunjukkan oleh t-statistik sebesar 0,542775 dan probabilitas sebesar 0,5902 – keduanya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, H_{a1} ditolak dan hipotesis nol (H_{01}) diterima. Hal ini menegaskan apa yang telah ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya (Kumala, 2021): bahwa ketimpangan pendapatan sedikit tetapi positif dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. (Arinda, 2024) dan (Simalango & Sri Setiawati, 2024) sampai pada kesimpulan serupa, yang menyatakan bahwa hubungannya positif tetapi tidak cukup signifikan secara statistik. Hasil ini dapat dijelaskan oleh teori berbentuk U terbalik Simon Kuznets, yang menyatakan bahwa kesenjangan pendapatan lebih menonjol selama fase awal ekspansi ekonomi. Namun, kesenjangan ekonomi akan menurun seiring berjalannya waktu dan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas adalah bahwa ekspansi ekonomi memiliki dampak yang dapat diabaikan terhadap kesenjangan pendapatan di wilayah Sumbagsel kemungkinan besar disebabkan oleh belum meratanya distribusi manfaat dari pembangunan ekonomi. Meskipun indikator makroekonomi menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, kenyataannya tidak semua kelompok masyarakat merasakan dampaknya secara langsung, terutama mereka yang berada dalam kelompok berpendapatan rendah. Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih bersifat eksklusif berpusat pada kelompok tertentu dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Ketika akses terhadap sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan yang layak, serta sektor-sektor produktif masih terbatas bagi sebagian besar penduduk, maka wajar jika pertumbuhan yang dicapai belum cukup kuat untuk menekan ketimpangan pendapatan secara signifikan.

Pengaruh Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumbagsel

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan sangat dipengaruhi oleh variabel Rasio Ketergantungan Penduduk yang mempunyai arah hubungan positif. Nilai t-Statistik sebesar 2,552391 dan nilai probabilitas sebesar $0,0144 < 0,05$ menyebabkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Berdasarkan hasil tersebut, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya rasio ketergantungan. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan antar demografi dapat melebar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak produktif, sehingga memberikan beban keuangan yang lebih besar kepada kelompok usia produktif. Temuan ini didukung oleh teori dalam Teori Demografi Ekonomi yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh struktur usia penduduknya, terutama terkait dengan besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja. Beban konsumsi bertambah tanpa disertai peningkatan output yang sesuai ketika fraksi penduduk yang tidak produktif (misalnya anak-anak dan lansia) besar, yang menyebabkan pendapatan per kapita lebih rendah. Kelompok dengan pendapatan rendah akan lebih terdampak oleh kondisi ini dibandingkan dengan kelompok dengan pendapatan tinggi, yang menambah ketimpangan pendapatan.

Hasil ini juga sesuai dengan apa yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Menurut penelitian di Indonesia (Utami, 2020), rasio ketergantungan memengaruhi indeks Gini pada tingkat signifikansi 0,038. Selain itu, t-statistik sebesar 11,74041 dan probabilitas 0,0000 menunjukkan hubungan statistik yang sangat kuat antara kemiskinan dan rasio ketergantungan penduduk (Rika Widianita, 2023). Hal ini ditemukan dalam penelitiannya di kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Rasio ketergantungan membandingkan penduduk usia kerja (15–64 tahun) dengan penduduk usia tua dan muda (masing-masing usia 0–14 dan 65+ tahun). Semakin tinggi jumlah orang dalam kelompok usia kerja berarti semakin tinggi pula beban keuangan pada rumah tangga, yang ditunjukkan dengan rasio yang tinggi. Teori tentang ketimpangan struktural memberikan penjelasan tentang dampak rasio ini terhadap kesenjangan pendapatan dengan menyatakan bahwa ketidakseimbangan populasi menyebabkan ketimpangan sumber daya dan membatasi peningkatan kesejahteraan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumbagsel

Analisis menemukan bahwa dari tahun 2015 hingga 2024, ketimpangan pendapatan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan tingkat probabilitas (Prob.) sebesar 0,0000 dan nilai t-Statistik sebesar -6,154051, nilai yang diperoleh secara signifikan lebih rendah dari ambang batas 0,05. Artinya, kami mengadopsi H_{a1} sebagai hipotesis alternatif dan menolak hipotesis nol (H_{02}). Data ini menunjukkan bahwa ketika IPM di Sumbagsel naik, ketimpangan pendapatan juga turun. Sebagai hasil dari kesehatan, pendidikan, dan kondisi kehidupan yang lebih baik, distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih merata seiring dengan kemajuan pembangunan manusia. Situasi ini dapat dipahami dengan mempertimbangkan bahwa orang yang memiliki akses lebih mudah ke layanan kesehatan dan pendidikan cenderung lebih produktif dan memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan, yang pada gilirannya membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Temuan ini konsisten dengan temuan (APRILIA, 2022) yang menemukan bahwa HDI secara signifikan dan negatif mempengaruhi ketimpangan pendapatan. (Yoertiara & Feriyanto, 2022) dan (Lala et al., 2023) sama-sama menemukan korelasi negatif dan signifikan secara statistik antara HDI dan ketimpangan pendapatan, sehingga temuan ini konsisten satu sama lain. Temuan studi ini memberikan kepercayaan pada teori Modal Manusia, yang mengusulkan bahwa belanja kesehatan dan pendidikan harus diprioritaskan untuk mencapai lebih banyak kesetaraan ekonomi dan produktivitas. Ketika mempertimbangkan demografi dan pertumbuhan ekonomi regional, kesehatan dan pendidikan bukan hanya tanda kemajuan tetapi juga instrumen untuk mengurangi ketimpangan. Hipotesis ketimpangan pendapatan, yang didukung oleh hasil ini, menekankan pemerataan pembangunan manusia sebagai kunci menekan kesenjangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan beban ketergantungan yang tepat cenderung menghasilkan pembangunan yang terpusat dan tidak merata.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Beban Ketergantungan Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumbagsel

Analisis statistik menunjukkan nilai probabilitas F-Statistik sebesar 0,000000, jauh lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini memberikan bukti kuat bahwa pertumbuhan ekonomi, rasio ketergantungan penduduk, dan indeks pembangunan manusia semuanya memiliki peran substansial dalam ketimpangan pendapatan di wilayah Sumbagsel, Sumatera Selatan. Ketimpangan pendapatan di wilayah ini disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara dinamika pembangunan, beban demografi, dan kualitas hidup masyarakat; hal ini tidak dapat dipahami hanya dari perspektif ekonomi. Jika peningkatan kualitas manusia dan pengelolaan struktur populasi yang efektif tidak sejalan dengan ekspansi ekonomi yang cepat, maka hasil pembangunan mungkin tidak terdistribusi secara merata. Jika kebijakan perlindungan sosial yang adaptif tidak ada, rasio ketergantungan yang tinggi, misalnya, dapat mengurangi daya dukung ekonomi rumah tangga dan memperburuk kesenjangan.

Namun, dalam hal pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak – yang semuanya berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih adil – indeks pembangunan manusia yang rendah biasanya menunjukkan masalah ini. Pembangunan manusia, menurut penelitian terkini, adalah landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil. Ketimpangan

pendapatan dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah cukup menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian (Safitri et al., 2024). Pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan kualitas manusia justru berpotensi memperdalam ketimpangan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, (Sulistiyowati & Agusalim, 2023) menegaskan bahwa IPM yang lebih tinggi cenderung menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, baik sebelum maupun saat krisis pandemi COVID-19. Hasil ini menggarisbawahi urgensi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang merata sebagai kunci dalam menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih adil. Sementara itu, penelitian oleh (Syukri et al., 2022) menyoroti dampak negatif dari tingginya rasio ketergantungan penduduk terhadap kemampuan menabung masyarakat. Ketidakseimbangan struktur demografi ini dapat melemahkan potensi ekonomi, serta memperlambat laju pembangunan yang berkeadilan. Dari sisi kebijakan, menekankan peran strategis program perlindungan sosial dan peningkatan akses pendidikan dalam menanggulangi kemiskinan serta memperkecil jurang ketimpangan. Ketimpangan akses pendidikan, menurutnya, masih menjadi persoalan krusial yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif.

Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Beban Ketergantungan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan distribusi, keberkahan harta, dan tanggung jawab sosial dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, rasio beban ketergantungan penduduk, dan indeks pembangunan manusia dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus memastikan distribusi pendapatan yang adil untuk mencegah disparitas pendapatan semakin meningkat (Fitrotus, S., & Salsabila Uswatun, 2023). Prinsip keadilan dan kehalalan merupakan fondasi utama dalam ekonomi Islam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga merata (Nurhayati, N., Fadillah, M. R., Selvina, M., & Nuraziza, 2024). Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai tren berkelanjutan yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi yang signifikan yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia (Nasution et al., 2023). Pertumbuhan ekonomi dalam Islam bukanlah sesuatu yang ditolak. Bahkan, Islam mendorong kemakmuran selama itu dicapai melalui cara yang halal dan memberi manfaat bagi banyak orang. Rasio beban ketergantungan penduduk yang tinggi dapat menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi, karena semakin banyak individu yang bergantung pada kelompok produktif, sehingga menuntut sistem ekonomi yang mampu mengakomodasi kebutuhan mereka melalui mekanisme zakat, wakaf, dan sedekah (Febila, 2024).

Rasio beban ketergantungan mengukur perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dan produktif. Dalam perspektif Islam, ini terkait dengan prinsip tanggung jawab bersama (mas'uliyah) dan kecukupan (kifayah). Optimalisasi pemberdayaan usia produktif dapat mengurangi beban ketergantungan dan menjadi potensi pembangunan. Pembangunan manusia harus fokus pada peningkatan kualitas produktivitas, akhlak, dan tanggung jawab sosial, yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui akses yang lebih baik ke sumber daya ekonomi (Shobri, H., Hasibuan, K. S., Nasution, M. D. M., & Nasution, 2022). IPM mengukur kesehatan, pendidikan,

dan standar hidup yang sejalan dengan prinsip maqāṣid al-shari‘ah dalam menjaga jiwa, akal, dan harta. Dalam ekonomi Islam, pembangunan harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan spiritualitas, sebagaimana dijelaskan oleh M. Umer Chapra dalam karyanya dalam (Yusuf, 2022), pembangunan manusia harus menyaraskan *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa) dan *‘imārat al-ardh* (pembangunan bumi), yang tidak hanya bermuara pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. IPM yang tinggi tanpa disertai keadilan sosial akan tetap menyisakan jurang ketimpangan. Maka, pembangunan manusia dalam Islam menuntut adanya redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah sebagai mekanisme pengaman sosial yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga struktural.

Dalam ekonomi Islam, keberkahan harta dinilai dari pemanfaatannya untuk kemaslahatan bersama, sehingga distribusi yang adil menjadi kunci tercapainya kesejahteraan sosial. Prinsip tanggung jawab sosial mendorong individu dan institusi untuk mengurangi ketimpangan melalui instrumen ekonomi Islam, sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْفُرْقَانِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنْ لَا يَكُونُ ذُوَلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا كَانُوكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. Al-Hasyr ayat 7).

Senada dengan itu, Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 memberikan perumpamaan yang sangat menyentuh tentang keutamaan berinfak di jalan-Nya, sebagai bentuk nyata dari solidaritas sosial dan kepedulian ekonomi antarumat.

عَلَيْهِمْ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ لِمَنْ يُضَاعِفُ وَاللَّهُ يَحِيدُ مَا تَنْهِيَ سُنْنَتِهِ كُلِّيٍّ فِي سَنَابِلِ سَعْيِ أَتَبْتَ حَبَّةً كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَقْلُ

Artinya: "Perumpamaan (*nafkah* yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".(Q.S Al-Baqarah Ayat 261)

Ayat ini mengajarkan bahwa keberkahan harta tidak semata-mata terletak pada kuantitas atau banyaknya harta yang dimiliki, melainkan pada bagaimana harta tersebut dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan harta yang diarahkan pada kepentingan sosial dan kesejahteraan umat menjadi cerminan dari tanggung jawab moral pemilik harta serta bentuk aktualisasi nilai keadilan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketimpangan pendapatan dan tingginya pengangguran menjadi tantangan utama dalam ekonomi global karena menghambat pertumbuhan, memperbesar beban ekonomi keluarga, dan meningkatkan rasio ketergantungan penduduk. Kondisi ini berdampak pada penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akibat terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam perspektif ekonomi Islam, isu ini mencerminkan ketidakadilan sosial yang perlu diatasi melalui distribusi kekayaan yang adil, pemanfaatan zakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.(Anggraini et al., 2023). Ketimpangan kepemilikan kekayaan dapat memicu disfungsi sosial dan ketidakstabilan. Islam menawarkan solusi melalui

sistem distribusi harta yang adil, di mana zakat berperan sebagai instrumen negara untuk menyalurkan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60, guna mewujudkan keadilan sosial.

إِنَّ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُومُ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَئِنِ السَّبِيلُ بِفِرَصَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".(Q.S At-Taubah:60)

Monzer Kahf dalam (Ichsan, 2022) menyebut bahwa ketimpangan dalam Islam tidak semata dilihat dari sisi statistik, tetapi dari cara kekayaan itu diperoleh dan digunakan. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi menuntut agar kekayaan tersebut tidak menjadi sarana eksloitasi atau penimbunan. Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan." (HR. Bukhari)

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam bukan semata-mata persoalan teknokratis atau kebijakan ekonomi sempit, melainkan merupakan manifestasi dari keimanan dan wujud nyata tanggung jawab sosial seorang Muslim. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dalam distribusi bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga bagian integral dari etika spiritual dan kesalehan sosial yang diajarkan dalam ajaran Islam

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis, nilai t-Statistic sebesar 0,542775 dengan tingkat probabilitas 0,5902 ($> 0,05$), mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumbagsel belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan secara signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan yang terjadi bersifat eksklusif dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
2. Rasio Beban Ketergantungan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan nilai t-Statistic sebesar 2,552391 dan tingkat signifikansi 0,0144 ($< 0,05$), dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi beban ketergantungan (jumlah penduduk usia non-produktif dibanding produktif), semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan beban ekonomi yang meningkat pada kelompok usia kerja, yang berdampak pada kesenjangan antar kelompok masyarakat.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil uji statistik menunjukkan t-Statistic sebesar -6,154051 dan nilai probabilitas 0,0000 ($< 0,05$). Ini berarti bahwa peningkatan IPM – yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup – berkontribusi nyata dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Masyarakat dengan IPM tinggi cenderung memiliki akses lebih merata terhadap peluang ekonomi.
4. Ketiga variabel (Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Beban Ketergantungan, dan IPM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai probabilitas

dari F-statistic adalah 0,000000 (< 0,05), yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah Sumbagsel merupakan hasil dari interaksi kompleks antara pertumbuhan ekonomi, struktur demografi, dan kualitas pembangunan manusia.

5. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah pertumbuhan yang adil dan inklusif. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara merata (QS. Al-Hasyr: 7) dan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf (QS. At-Taubah: 60). Oleh karena itu, pendekatan pembangunan berbasis falāh (kesejahteraan lahir dan batin) perlu dijadikan dasar dalam upaya mengurangi ketimpangan dan mewujudkan keadilan sosial.

Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah dalam kajian ketimpangan pendapatan, khususnya terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, rasio beban ketergantungan penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi studi selanjutnya yang ingin memperluas analisis dengan tambahan variabel, cakupan wilayah lebih luas, atau pendekatan metodologis yang berbeda.

REFERENSI

- Adnyaswari, A. A. M. A., & Purbhadharma, I. B. P. (2023). Pengaruh Pmtb, Inflasi Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2184. <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i11.p07>
- Afton, P., & Ukas, U. (2023). Analisis Yuridis Dampak Inflasi Terhadap Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7855>
- Akbar, U. U., Sari, Y. P., Yeni, I., Adry, M. R., Putri, D. Z., Ekonomi, F., & Padang, U. N. (2021). PENDAPATAN DI INDONESIA (Studi : Data Panel Pertumbuhan Sektor Pertanian). *Education and development*, 9(4), 421–425.
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Susilo, K. E., Yasin, M., & Soemadijo, P. S. (2021). *Statistik Deskriptif. Zifatama Jawara*.
- Anggraeni, E., & Susanto, I. (2025). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Pengaruh TPAK, Pendidikan, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan*. 7, 135–140. <https://doi.org/10.37034/infeb.v7i2.1108>
- Anggraini, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Tirtayasa Ekonomika*, 18(1), 123. <https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613>
- APRILIA, S. (2022). *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Sumatera Selatan*. 33(1), 1–12.
- Arinda, R. (2024). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2013-2022. *Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung*, 15(1), 37–48.
- Aris, S. (2023). *Macroeconometric Model: Kemiskinan,Ketimpangan,Distribusi Pendapatan dan Kebijakan Macroprudential di Indonesia*. 24. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MZ6vEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=utang+luar+negeri+investasi+asing+pertumbuhan+ekonomi+kemiskinan+dan+path>

- +analysis&ots=oRPxhPaO9O&sig=2uFF2H7Cd4JLq_lwl-nJ0-ljM8E
- Basuki, A. T. (2021). *Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Dewi, D. M., Setiadi, Y., Ikhwanuddin, M., & Fadhilah, L. A. (2022). Kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kelompok Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 221–242. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.13>
- Disdukcapil. (2023). *PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)*. 0756, 2-4. file:///C:/Users/NEW/Downloads/06_-_RASIO_KETERGANTUNGAN.pdf
- Febila, E. (2024). MANUSIA (IPM), DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE TAHUN 2018-2022 (Studi pada 34 Provinsi di Indonesia) PENGARUH JUMLAH PENDUDUK , INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TERHADAP TIN. *Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*.
- Fitrotus, S., & Salsabila Uswatun, H. (2023). PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Ghozali, I. (2023). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS* 23. <https://perpus.petra.ac.id/catalog/site/detail?id=149488>.
- Ichsan, W. (2022). Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Harta Menurut Taqî Al-Dîn Al-Nabhânî Dan Muhammad Bâqir Al-Şadr; Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 1–18. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21859>
- Jubba, H., Nuril Ferdaus, N., Ika Pratiwi, W., & Juhansar. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19. *Dialektika*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.33477/dj.v14i1.2176>
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Kumala, S. L. (2021). *Journal of Economics and Regional Science* P-Issn : 2776-2939 E-Issn : 2776-3196. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(2), 109–117.
- Kunenengan, R. M. ., Engka, D. S. ., & Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota Di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3), 133–144.
- Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Dj Siwu, H. F. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Studi Pada Kota-Kota Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 61–72.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Makipantung, R. O., Walewangko, E. N., Niode, A. O., & Makipantung, R. O. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ip) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Wilayah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 157–168.
- Mudrajad Kuncoro. (2017). *Mudah Memahami & Menganalisis; Indikator Ekonomi*.
- Mulyani, E. (2017). *Ekonomi Pembangunan (1st ed.)*. UNY Press.

- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63–71. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/jmcbus/article/view/484/466>
- Novriyandi, R., Hakim, D. B., & Rustiadi, E. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA belitung. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 12.
- Nurhayati, N., Fadillah, M. R., Selvina, M., & Nuraziza, S. (2024). The influence of perceived quality and viral marketing on the decision to purchase Momoyo Ice Cream according to the Islamic business perspective. *Indonesia Auditing Research Journal*, 13(2), 53–62.
- Rahman, S. S. dan A. H. (2019). *Ekonometri*.
- Rika Widianita, D. (2023). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Periode Tahun 2010-2020). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Safitri, I. M., Apridar, A., & Dawood, T. C. (2024). *The Impact of Income Inequality , Human Development , Gender Development and Open Unemployment on Economic Growth in Indonesia*. 3(2), 120–127. <https://doi.org/10.56225/ijfeb.v3i2.330>
- Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., & Mulyani, S. R. (2022). Analisis Regresi Data Panel. *Statistik Multivariat Dalam Riset*., December, 241–253.
- Shobri, H., Hasibuan, K. S., Nasution, M. D. M., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipdm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Sumatera Utara. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 264–274. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v4i2.12807>
- Sholikah N Rodiyatul, & Imaningsih Niniek. (2022). Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Serta Pengaruhnya Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 10.
- Simalango, M., & Sri Setiawati, R. I. (2024). Analisis Faktor yang Memperngaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Gerbangkertosusila. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 433–442. <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.24911>
- Sulistiyowati, & Agusalim, L. (2023). Covid-19, Ketimpangan Gender, Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris Indonesia. *Sosio Informa*, 9(2), 173–196.
- Syari, P. (2024). *Jurnal Ekonomika*. 13(2), 134–153.
- Syukri, M., Mhamut, C., Sari, I., Pembangunan, E., Pembangunan, E., Pembangunan, E., & Pembangunan, E. (2022). *DEPENDENCY RATIO , HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) ON*. 1(1), 94–103.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.).
- Utami, R. B. (2020). Analisis Pengaruh Angka Beban Ketergantungan, Kepadatan Penduduk, Garis Kemiskinan Terhadap Indeks Gini Di Indonesia. *Medical Technology and Public Health Journal*, 4(2), 212–223. <https://doi.org/10.33086/mtphj.v4i2.806>
- Widarjono, A. (2020). Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EVIEWS. In *Yogyakarta : UPP STIM YKPN*. <http://repository.ut.ac.id/3891/1/EKSI4417-M1.pdf>
- Widyawati, D., & Muchlisoh, S. (2022). Poverty Map sebagai Potret Ketimpangan Pendapatan Area Kecil di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 162–178.

- <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.10>
- Wulandari, D., Fauzi Aziz, K., & Muslinawati, R. (2023). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Keterbukaan Perdagangan, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 10(4), 610–627. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i4.4976>
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 92–100. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art9>
- Yuliansyah. (2021). Analysis of the Human Development Index (Hdi) in Indonesia. *Cross-Border Journal of Businees Management*, 1(2), 244–256.
- Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633>
- Zainuddin, Bakri, M., & Mufadhdhal, M. F. (2023). Analisis Kausalitas Kebebasan Sipil dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 164–172. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.825>